

**Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit,
Opini Audit, dan Tingkat Ketergantungan terhadap
Durasi Proses Audit pada Pemerintah Daerah Indonesia**



TESIS

Oleh :

Anggunita Surya Gupitasari

20919044

MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

ANGGUNITA SURYA GUPITASARI

No. Mhs. : 20919044

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT, DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN TERHADAP DURASI PROSES AUDIT PADA PEMERINTAH DAERAH INDONESIA

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

الجامعة الإسلامية
بندونان

Penguji I

Arief Rahman, SIP., SE., M.Com., Ph.D.

Penguji II

Dra. Yuni Nustini, MAFIS., Ak., CA., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dngan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Master di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 1 Februari 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anggunita', is written over a red rectangular stamp. The stamp contains a small emblem and some illegible text.

(**Anggunita Surya Gupitasari**)

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arief Rahman', written over a horizontal line.

Arief Rahman, SIP., SE., M.Com., Ph.D.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikut beliau yang masih setia mengikuti dan mengamalkan ajarannya hingga saat ini.

Penelitian berjudul **“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit, Opini Audit, dan Tingkat Ketergantungan terhadap Durasi Proses Audit pada Pemerintah Daerah Indonesia”** disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu tesis sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Magister (S2) pada program studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomikan Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan Tesis ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang mencitai hamba-Nya dengan senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan, serta menjawab setiap doa hamba-Nya dalam menjalani segala aktivitas sebagai seorang muslim yang berjuang menuntut ilmu di jalan-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh khalifah di muka bumi. Semoga keteladanan beliau dalam segala hal akan terus menjadi pedoman bagi penulis dalam memperbaiki diri dengan menjalani kehidupan sebagai seorang muslim.

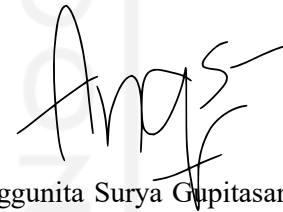
3. Alm. Drs. Iswoyo Hadiwarno dan Erna Yuni Setyaningsih selaku orang tua penulis yang telah memberikan doa, motivasi, dorongan, semangat dan rasa tanggung jawab bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) ini dengan semangat.
4. Dr.H.Azharuddin., S.H.,M.Kn. dan Pramita Salazar, S.H.,SpN. selaku mertua penulis yang telah memberikan doa, motivasi, dorongan, semangat dan rasa tanggung jawab bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) ini dengan semangat.
5. Alvin Zeri Hardiansyah selaku suami penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, setia menemani dan mengingatkan untuk mengerjakan tesis.
6. Terimakasih kepada Rektor Universitas Islam Indonesia Bapak Prof Fathul Wahid, ST, M,Sc, Ph.D., Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D, Ketua Jurusan Akuntansi FBE UII Bapak Dekar Urumsah, Drs., S.Si., M.Com (IS)., Ph.D., CFrA dan Ketua Program Studi Magister akuntansi Bapak Arief Rahman, SIP., S.E., M.Com., Ph.D. atas segala fasilitas dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan lancar
7. Bapak Arief Rahman, SIP., S.E., M.Com., Ph.D. selaku dosen pembimbing Tesis penulis yang telah membimbing penulis dengan sabar dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat selalu rajin mengarahkanTesis sehingga penulis dapat menyelesaikanTesis tepat pada waktunya.
8. Bapak Aditya Pandu Wicaksono, SE., M.Ak., Ak. Bapak Dosen yang selalu memberi masukan dan membantu dalam proses penyusunan tesis
9. Teman-teman Jack Office (Alumni BAC) Mas Vio, Ivana, Aulia, Rendra, Gilang, Adel.
10. Teman-teman Magister Akuntansi FBE UII

11. Kepada seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, semangat, dan motivasinya.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya bagi Papa, Mama, Saudara dan teman-teman yang telah membantu penulis dalam segala hal. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran masih diperlukan dan harap disampaikan untuk menyempurnakannya.

Wassalamualaikum wr.wb

Penulis,



(Anggunita Surya Gupitasari)

الجامعة الإسلامية
الاستدراكية

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah, temuan audit, opini audit, dan tingkat ketergantungan terhadap durasi proses audit di pemerintah daerah Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang memenuhi kriteria purposive sampling dengan data sekunder yang dikumpulkan berupa Laporan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015-2020 yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemda, temuan audit, dan tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap durasi proses audit. Sedangkan opini audit memiliki pengaruh terhadap durasi proses audit. Analisis data menggunakan pengujian model data panel. Pengaruh seluruh variabel sebesar 55,7% sedangkan sisanya sebesar 44,3% dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata kunci: Ukuran, temuan, opini, dan tingkat ketergantungan



ABSTRACT

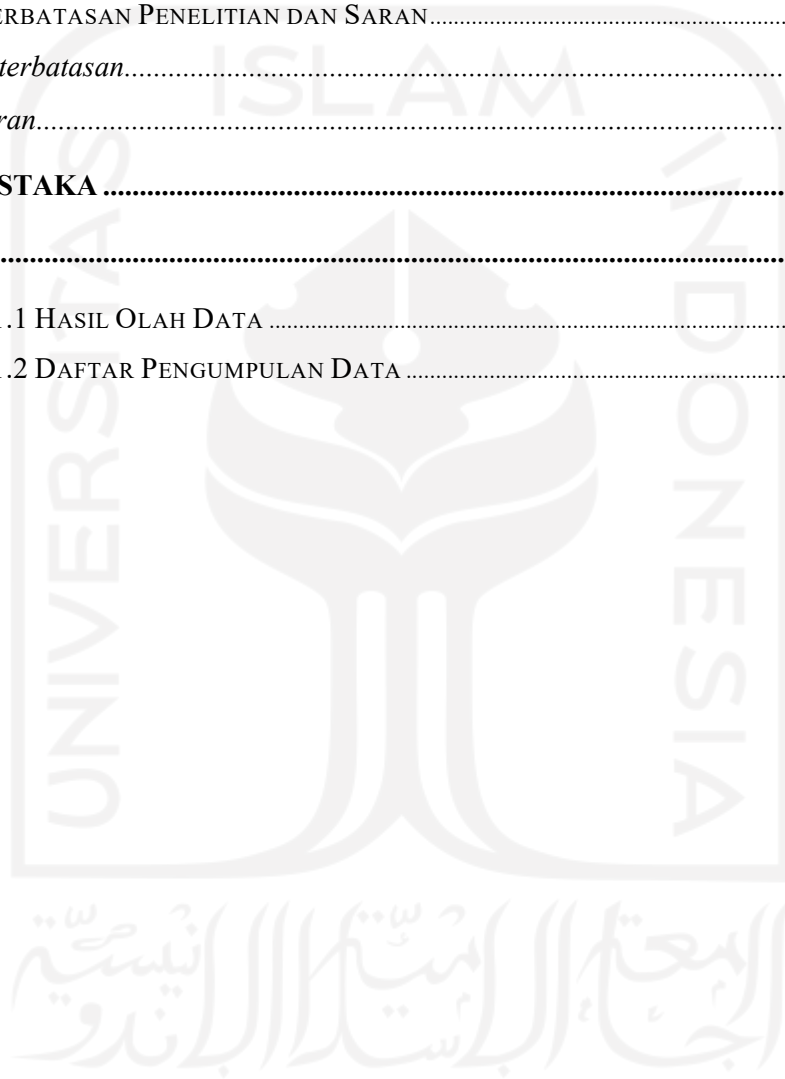
This study aims to examine the influence of local government size, audit findings, audit opinions, and the degree of dependency on the duration of the audit process in Indonesian local governments. The sample used in this research is local governments that meet purposive sampling criteria with secondary data collected in the form of local government reports (LKPD) for 2015-2020 which are registered with the Financial Audit Agency (BPK) of the Republic of Indonesia. The results show that the size of local government, audit findings, and the level of dependability have no effect on the duration of the audit process. While the audit opinion has an influence on the duration of the audit process. Data analysis uses panel data model testing. The influence of all variables is 55.7% while the remaining 44.3% is influenced by other variables.

Keywords: *Size, findings, opinions, and the level of dependency*

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| BAB I | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2 RUMUSAN MASALAH | 3 |
| 1.3 TUJUAN PENELITIAN | 3 |
| 1.4 MANFAAT PENELITIAN | 3 |
| 1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN..... | 4 |
| BAB II | 6 |
| 2.1 TEORI SIGNAL (<i>SIGNALING THEORY</i>) | 6 |
| 2.2 LAPORAN KEUANGAN..... | 6 |
| 2.3 <i>AUDIT REPORT LAG / DURASI PROSES AUDIT</i> | 7 |
| <i>Tabel 2.1. Penelitian-penelitian terdahulu</i> | 8 |
| 2.4 KERANGKA PEMIKIRAN | 15 |
| 2.5 HIPOTESIS PENELITIAN | 15 |
| BAB III | 19 |
| 3.1 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN | 19 |
| 3.2 JENIS DAN SUMBER DATA | 19 |
| 3.3 VARIABEL PENELITIAN | 19 |
| 3.3.1 <i>Variabel Dependen</i> | 19 |
| 3.3.2 <i>Variabel Independen</i> | 20 |
| 3.4 METODE ANALISIS DATA | 22 |
| 3.4.1 <i>Statistik Deskriptif</i> | 22 |
| 3.4.2 <i>Uji Koefisien Determinasi (R-Square)</i> | 22 |
| 3.4.3 <i>Uji Hipotesis (Uji T)</i> | 22 |
| 3.4.4 <i>Panel Data Model Testing</i> | 23 |
| BAB IV | 24 |
| 4.1 DESKRIPSI HASIL PENGUMPULAN DATA | 24 |
| <i>Tabel 4.1 Deskriptif Data</i> | 24 |
| 4.2 ANALISIS MODEL STRUKTURAL..... | 26 |
| <i>Tabel 4.2 Analisis R-Square</i> | 26 |
| 4.3 UJI HIPOTESIS (UJI T) | 26 |

| | |
|--|-----------|
| <i>Tabel 4.3 Hasil Uji Hipotesis</i> | 27 |
| 4.4 <i>FIXED EFFECT METHOD</i> | 28 |
| <i>Tabel 4.4 Hasil Uji Fixed Effect Method</i> | 28 |
| 4.5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 28 |
| BAB V | 33 |
| 5.1 KESIMPULAN | 33 |
| 5.2 KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN..... | 34 |
| 5.2.1 <i>Keterbatasan</i> | 34 |
| 5.2.2 <i>Saran</i> | 34 |
| DAFTAR PUSTAKA | 35 |
| LAMPIRAN | 37 |
| LAMPIRAN 1.1 HASIL OLAH DATA | 37 |
| LAMPIRAN 1.2 DAFTAR PENGUMPULAN DATA | 39 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari proses pelaporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pada umumnya bertujuan untuk mengetahui kebutuhan informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan oleh pengguna. Selain itu, agar informasi tersebut relevan maka harus disajikan secara tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Untuk memenuhi ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan, maka pimpinan dan auditor diharapkan dapat meminimalkan durasi proses audit (Ali, Yeni, & Si, 2019).

Dalam instansi pemerintah daerah Indonesia proses audit hanya dapat dilakukan jika pemerintah daerah tersebut telah memberikan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK selanjutnya mengeluarkan surat tugas audit kepada auditornya, surat tugas audit tersebut berisikan lamanya waktu yang diberikan untuk melakukan pekerjaan lapangan. Proses audit yang dilakukan oleh BPK dalam melakukan proses audit dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yang berhubungan dengan kondisi internal pemerintah daerah. Maka dari itu, hal ini sangat berbeda dengan proses audit yang terjadi pada sektor swasta di mana auditor dalam melakukan pekerjaan lapangan tidak diberikan batas waktu (Endiana & Apriada, 2020).

Pada tahun pelaporan 2015 dan 2016 rata-rata durasi proses audit laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia dari 34 provinsi adalah 150 hari. Pada tahun pelaporan 2017 dan 2018 mengalami penurunan rata-rata 142 hari. Pada tahun

pelaporan 2019 mengalami kenaikan rata-rata menjadi 165 hari. Hal ini dapat dikatakan bahwa durasi proses audit di Indonesia mengalami peningkatan dari pelaporan sebelumnya. Pada tahun 2020 mengalami penurunan rata-rata yang cukup signifikan menjadi 137 hari (sumber: BPK). Dari tahun pelaporan 2015-2020, masih terdapat beberapa provinsi di Indonesia yang mengalami keterlambatan penerbitan LKPD oleh BPK-RI.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya durasi proses audit telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Gamayuni (2018), Siregar (2015), Ali et al. (2019), Wafa & Nugraeni (2018), dan (Bakar & Arza, 2019) dengan menggunakan beberapa variabel diantaranya ukuran pemerintah daerah, umur, *incumbent*, temuan audit, opini audit, nilai APBD, leverage, dan pengalaman pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat beberapa kelemahan diantaranya ada yang melakukan hanya 3 tahun anggaran yaitu tahun 2015 sampai dengan 2017 dan terdapat data-data yang memiliki nilai cukup ekstrim (terlalu tinggi atau terlalu rendah) sehingga data yang diuji tidak memiliki nilai yang signifikan. Beberapa penelitian menyarankan agar penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap durasi proses audit. (Bakar & Arza, 2019) menyarankan untuk penelitian selanjutnya diharapkan pemerintah daerah lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mengurangi tenggang waktu durasi proses audit agar berkurangnya kasus durasi proses audit yang terjadi di pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mendapat opini audit WTP diharapkan dapat mempertahankannya dan yang mendapatkan opini audit selain WTP diharapkan dapat meningkatkannya. Lalu, untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang mempengaruhi adanya durasi proses audit seperti tingkat ketergantungan daerah pada durasi proses audit. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan,

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit, Opini Audit, dan Tingkat Ketergantungan terhadap Durasi Proses Audit pada Pemerintah Daerah Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap durasi proses audit di Pemerintah Daerah Indonesia?
2. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap durasi proses audit di Pemerintah Daerah Indonesia?
3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap durasi proses audit di Pemerintah Daerah Indonesia?
4. Apakah tingkat ketergantungan berpengaruh terhadap durasi proses audit di Pemerintah Daerah Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris beberapa faktor seperti ukuran pemerintah daerah, temuan audit, opini audit, dan tingkat ketergantungan yang diduga bisa menjadi pengaruh dalam durasi proses audit di Pemerintah Daerah Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, di mana penelitian ini terdapat pembaharuan dengan menambahkan variabel tingkat ketergantungan untuk mengetahui ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang dikirim kepada pemerintah daerah dan untuk mengetahui penggunaan pendapatan tersebut untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.

2. Manfaat praktis

a) Bagi auditor

Penelitian ini diharapkan mampu membantu auditor mengetahui faktor-faktor dominan yang menyebabkan durasi proses audit dan membantu auditor dalam mengendalikan faktor-faktor dominan yang menyebabkan durasi proses audit.

b) Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi perpustakaan dan bahan pembandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian berikutnya di bidang yang sama di masa mendatang.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang digunakan untuk melandasi penelitian, tinjauan penelitian terdahulu yang relevan, hipotesis penelitian, dan kerangka konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan terkait dengan bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Pada bagian ini diuraikan tentang populasi dan penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, definisi dan pengukuran variabel penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis statistik deskriptif masing-masing variabel, menyajikan hasil olah data, serta pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai pemaparan simpulan serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

KAJIAN PUASTAKA

2.1 Teori Signal (*Signaling Theory*)

Teori tersebut memiliki entitas yang berkualitas yang akan memberikan sinyal kepada pengguna laporan dengan menungkapkan informasi yang lengkap. Pengungkapan laporan keuangan pada dasarnya merupakan bentuk penyampaian informasi dari suatu entitas kepada pengguna laporan keuangan. Teori sinyal juga menyatakan bahwa terdapat kandungan informasi dalam suatu pengumuman yang dapat menjadi sinyal dan pertimbangan bagi investor dan pihak lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi.

Dengan demikian semakin banyak pengungkapan yang dilakukan maka semakin menunjukkan bahwa entitas tersebut semakin berkualitas. Pengungkapan sendiri dikelompokkan menjadi dua macam yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu bentuk informasi yang relevan terkait posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu organisasi pada suatu periode dan disajikan secara terstruktur. Laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penggunanya agar dapat dijadikan pedoman dalam mengambil sebuah keputusan, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen (Bakar & Arza, 2019).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah digunakan sebagai cerminan kinerja pemerintah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber daya yang bertujuan untuk pengambilan keputusan bagi banyak pihak. Laporan keuangan sendiri

bertujuan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, melihat kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu organisasi pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Siregar, 2015).

2.3 Audit Report Lag / Durasi Proses Audit

Audit merupakan suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Tullah, Apriyanti, & Rianti, 2019). Menurut (Ali et al., 2019) audit adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independent, atas laporan keuangan beserta catatan akuntansi dan bukti pendukung lainnya yang bertujuan untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Sedangkan *timeliness* sebagai jumlah hari diantara akhir tahun keuangan perusahaan dan hari-hari laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit kepada publik telah diterbitkan. (Gamayuni, 2018) memberikan definisi Audit Report Lag sebagai durasi dari akhir tahun fiskal perusahaan hingga tanggal ketika auditor menandatangani laporan tersebut. Sedangkan (Tullah et al., 2019) mendefinisikan Audit Report Lag sebagai proses dilakukannya pemeriksaan atau audit yang membutuhkan waktu dan pada akhirnya memunculkan jarak antara berakhirnya periode akuntansi hingga diterbitkannya laporan auditor, rentang waktu antara berakhirnya periode akuntansi (31 Desember) hingga tanggal diterbitkannya laporan auditor.

Tabel 2.1. Penelitian-penelitian terdahulu

| No. | Variabel Independen | Kesimpulan |
|-----|--------------------------|---|
| 1. | Ukuran Pemerintah Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Berpengaruh positif terhadap durasi proses audit (Syahyuni, Arza, & Afriyenti, 2018) • Berpengaruh negatif terhadap durasi proses audit (Siregar, 2015) dan (Wafa & Nugraeni, 2018) • Tidak berpengaruh terhadap durasi proses audit (Ali et al., 2019) ; (Gamayuni, 2018) ; (Bakar & Arza, 2019) ; (Priharjanto & Wardani, 2017) ; (Tullah et al., 2019) |
| 2. | Temuan Audit | <ul style="list-style-type: none"> • Berpengaruh positif terhadap durasi proses audit (Gamayuni, 2018) ; (Wafa & Nugraeni, 2018) • Tidak berpengaruh terhadap durasi proses audit (Priharjanto & Wardani, 2017) |
| 3. | Opini Audit | <ul style="list-style-type: none"> • Berpengaruh positif terhadap durasi proses audit (Ali et al., 2019) ; (Priharjanto & Wardani, 2017) ; (Tullah et al., 2019) ; dan (Wafa & Nugraeni, 2018) • Berpengaruh negatif terhadap durasi proses audit (Bakar & Arza, 2019) • Tidak berpengaruh terhadap durasi proses audit (Gamayuni, 2018) |
| 4. | Tingkat Ketergantungan | <ul style="list-style-type: none"> • Berpengaruh positif terhadap durasi proses audit (Anggara & Cheisviyanny, 2020) • Berpengaruh negatif terhadap durasi proses audit (Tullah et al., 2019) ; (Purnama et al., 2018) ; dan (Syahyuni et al., 2018) • Tidak berpengaruh terhadap durasi proses audit (Badruddin, Agustina, & Chyntia, 2019) |

Ukuran Pemerintah Daerah adalah sebuah gambaran besar atau kecilnya suatu perusahaan atau daerah. Ukuran daerah dalam penelitian ini diproksikan dengan melihat total aset yang diperoleh dalam setiap tahunnya. Akan tetapi, besar kecilnya perusahaan atau daerah dapat dilihat dari beberapa proksi diantaranya total aset dan total pendapatan (Ali et al., 2019). Total aset ini menunjukkan sumber daya yang secara potensial dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut memberikan pelaporan yang baik dan menyeluruh mengenai pengungkapan wajib dari aset-aset tersebut. Pemerintah daerah dengan skala besar akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Akan tetapi, pemerintah daerah yang mempunyai ukuran daerah lebih besar akan memiliki tekanan yang lebih besar dari publik dalam menyajikan laporan keuangan karena adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan. Mereka juga beranggapan bahwa pemerintah daerah yang memiliki sumber daya atau aset yang besar pasti memiliki lebih banyak sumber informasi, sistem informasi yang semakin canggih, sistem pengendalian internal yang lebih baik, dan adanya pengawasan dari investor dan masyarakat yang membuat pemerintah daerah tersebut melaporkan laporan keuangan auditnya lebih cepat ke publik (Bakar & Arza, 2019). Hasil penelitian dari (Syahyuni et al., 2018) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap durasi proses audit. Sedangkan Siregar (2015) dan Wafa & Nugraeni (2018) menemukan hasil yang tidak sejalan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian dari (Ali et al., 2019) ; (Gamayuni, 2018) ; (Bakar & Arza, 2019) ; (Priharjanto & Wardani, 2017) ; (Tullah et al., 2019).

Temuan Audit merupakan sekumpulan data dan informasi yang diuji selama melakukan tugas audit atas kegiatan suatu organisasi tertentu yang disajikan secara

analitis menurut unsur-unsurnya yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Selama pelaksanaan audit, auditor mengidentifikasi keadaan yang memerlukan tindakan korektif atas penyimpangan dari norma, peraturan, atau kriteria yang dapat diterima. Berdasarkan Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan dan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Temuan audit sangat penting dalam penelitian ini karena dianggap dapat mempengaruhi durasi penyelesaian laporan audit. Hal ini disebabkan karena kebutuhan audit dalam memberikan tanggapan atau rekomendasi atas temuan audit yang dilakukan oleh BPK. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini audit, temuan audit, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi. Temuan dan rekomendasi tersebut akan dikomunikasikan dengan objek pemeriksaan agar dilakukan perbaikan dan koreksi (Gamayuni, 2018). Hasil penelitian dari (Gamayuni, 2018) dan (Wafa & Nugraeni, 2018) menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh positif terhadap durasi proses audit. Akan tetapi hasil ini tidak sejalan dengan penelitian dari (Priharjanto & Wardani, 2017).

Opini Audit merupakan salah satu hasil pemeriksaan dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai cerminan dari kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan APBD. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. BPK akan memberikan penilaian pada LKPD setiap

tahunnya berupa opini atas kewajaran laporan keuangan. Ada empat jenis opini BPK atas laporan keuangan pemerintah, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Menurut Khoirul Fuad (2019) Opini audit merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini BPK dapat menjadi indikator penilaian pertanggung jawaban dari sebuah entitas pemerintahan. Opini audit bagi stakeholders dapat menambah ataupun menurunkan *level of confidence*, dari laporan yang telah disajikan oleh pihak yang diaudit. Opini tentang WTP merupakan informasi baik yang harus diberitakan sesegera mungkin. Selain itu, untuk opini WDP menunjukkan bahwa diperlukan prosedur tambahan selama audit yang akan meningkatkan adanya durasi proses audit. Penyusunan laporan keuangan yang baik dapat menjadi cerminan bahwa daerah tersebut memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Maka dari itu, daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik tentu akan memiliki system penyusunan laporan keuangan yang baik juga (Ali et al., 2019). Hasil penelitian dari (Ali et al., 2019) ; (Priharjanto & Wardani, 2017) ; (Tullah et al., 2019) ; (Wafa & Nugraeni, 2018) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap durasi proses audit. Bakar & Arza (2019) menemukan hasil yang tidak sejalan bahwa opini audit berpengaruh negatif.

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait penelitian dengan variabel Ukuran Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh (Syahyuni et al., 2018) ; (Siregar, 2015) ; (Wafa & Nugraeni, 2018) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap durasi proses audit. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian dari (Ali et al., 2019) ; (Gamayuni, 2018) ; (Bakar & Arza, 2019) ; (Priharjanto & Wardani, 2017) ; (Tullah et al., 2019). Hal ini dikarenakan pemerintah daerah yang

memiliki ukuran besar atau kecil bukan menjadi suatu alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan dan berakibat pada bertambahnya tenggang waktu durasi proses audit, dikarenakan unsur kepatuhan pada peraturan yang berlaku dan pengawasan (DPRD dan masyarakat) yang cukup ketat mengharuskan pemerintah daerah untuk tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. Di sisi lain, aset yang mencerminkan ukuran dari pemerintah daerah dalam pengelolaannya maupun penatausahaannya masih belum dilaksanakan dengan maksimal. Salah satu penyebab dari penatausahaan aset yang belum maksimal yaitu masalah pencatatan dan dokumentasi yang mengakibatkan pengungkapan di laporan keuangan menjadi tidak maksimal. Dari hasil penelitian tersebut dengan variabel yang sama yaitu Ukuran Pemerintah Daerah membuktikan bahwa hasil penelitian tidak konsisten.

Penelitian dengan variabel temuan audit yang dilakukan oleh (Gamayuni, 2018) dan (Wafa & Nugraeni, 2018) membuktikan bahwa temuan audit berpengaruh signifikan terhadap durasi proses audit. Sedangkan penelitian (Priharjanto & Wardani, 2017) menunjukkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap durasi proses audit. Hal ini dikarenakan kurangnya usaha pemerintah daerah untuk melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Jumlah temuan audit yang banyak belum tentu dapat mempresentasikan nilai atau tingkat materialitas yang tinggi pula. Pemerintah daerah cenderung melihat temuan audit dari segi nilai (materialitas) bukan dari jumlah.

Penelitian dengan variabel opini audit yang dijalankan oleh (Ali et al., 2019) ; (Bakar & Arza, 2019) ; (Priharjanto & Wardani, 2017) ; (Tullah et al., 2019) ; dan (Wafa & Nugraeni, 2018) membuktikan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap durasi proses audit. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari (Gamayuni, 2018) menunjukkan opini audit tidak berpengaruh terhadap durasi

proses audit. Hal ini bisa terjadi karena auditor melakukan pekerjaannya secara professional sehingga apapun opini yang dikeluarkan auditor tidak mempengaruhi lamanya waktu pelaporan audit laporan keuangan. Selain itu, auditor dalam menentukan kewajaran laporan keuangan dan mengeluarkan opini WTP juga membutuhkan waktu yang lama karena harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan kompeten. Dalam hal ini, pekerjaan auditor telah bekerja secara professional sehingga apapun opini audit yang dikeluarkan auditor tidak akan mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu mengenai durasi proses audit terdapat beberapa kekurangan, seperti ada yang melakukan hanya 3 tahun anggaran yaitu tahun 2015 sampai dengan 2017 dan terdapat data-data yang memiliki nilai cukup ekstrim (terlalu tinggi atau terlalu rendah) sehingga data yang diuji tidak memiliki nilai yang signifikan. Menurut penelitian terdahulu (Bakar & Arza, 2019) memberikan saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan pemerintah daerah lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mengurangi tenggang waktu durasi proses audit agar berkurangnya kasus durasi proses audit yang terjadi di pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mendapat opini audit WTP diharapkan dapat mempertahankannya dan yang mendapatkan opini audit selain WTP diharapkan dapat meningkatkannya. Lalu, untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang mempengaruhi adanya durasi proses audit seperti tingkat ketergantungan daerah pada audit report lag. Dengan semakin tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah akan semakin tunduk untuk mematuhi peraturan Pemerintah Pusat. Sebagai akibatnya, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih tepat waktu dan akan mengurangi durasi proses audit. Menurut UU No 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 75 ayat (1) disebutkan

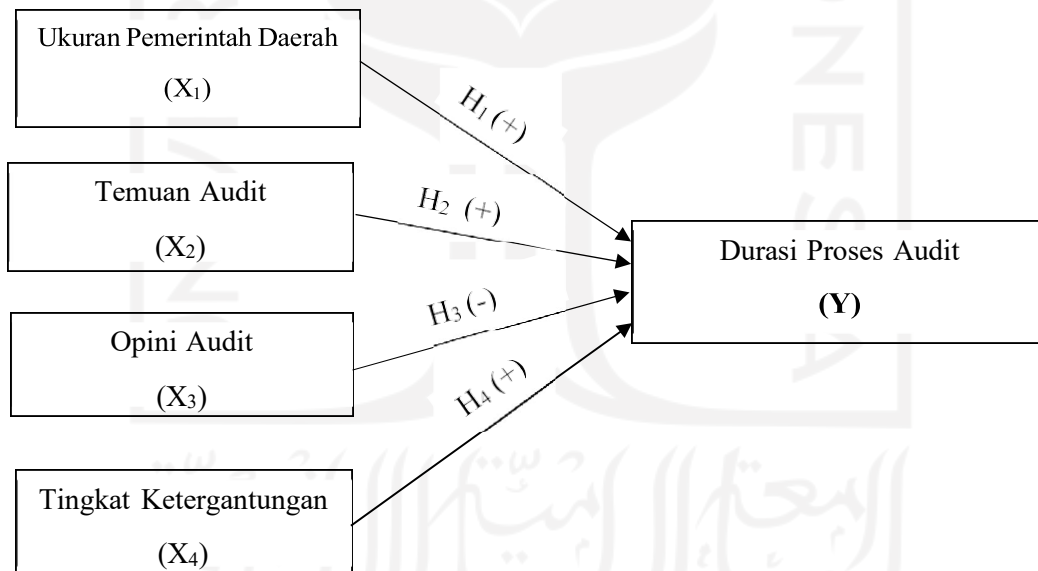
bahwa SKPD yang secara sengaja atau lalai dalam menyampaikan laporan akan dikenakan sanksi kepada pemerintah daerah berupa penundaan pencairan dana bantuan apabila pemerintah daerah terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada Pemerintah Pusat dan penghentian alokasi dana dan tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya. Dengan adanya seperti itu, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih tepat waktu dan durasi proses audit akan berkurang (Purnama, Gamayuni, & Amelia, 2018).

Tingkat Ketergantungan menurut UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah salah satunya yaitu pendapatan transfer. Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Robbins & Austin (1986) memaparkan bahwa *intergovernmental revenue* merepresentasikan tingkat ketergantungan pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan yang tinggi cenderung meningkatkan tingkat pengungkapan. Hal ini disebabkan adanya kepentingan bagi pemerintah pusat untuk memantau apa yang dilakukan pemerintah daerah dan tingkat pencapaian kinerja atas alokasi dana yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan ini ditunjukkan dengan besarnya dana perimbangan (khususnya DAU) yang ditransfer kepada pemerintah daerah dalam pembiayaan pengeluaran daerah. Melalui dana yang telah diberikan, pemerintah pusat akan memonitor penggunaan DAU untuk memastikan bahwa pemerintah daerah telah mengoptimalkan penggunaan sumber dana untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah itu sendiri. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah

untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tingkat ketergantungan dalam penelitian ini dihitung dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dibagi dengan total pendapatan yang masuk ke dalam pendapatan pemerintah daerah. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Hasil penelitian dari (Anggara & Cheisviyanny, 2020) ; (Tullah et al., 2019) ; (Purnama et al., 2018) ; dan (Syahyuni et al., 2018) menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap durasi proses audit. Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari (Badruddin et al., 2019).

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat digambarkan hubungan atau keterkaitan antar variabel yang satu dengan variabel yang lain, sebagai berikut :



2.5 Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Durasi Proses Audit

Ukuran pemerintah daerah yang besar akan mengalami durasi proses audit yang lebih lama. Hal ini terkait dengan meningkatnya jumlah transaksi keuangan pada daerah tersebut. Didasarkan pada asumsi yang menyatakan bahwa pemerintahan yang

memiliki asset yang lebih besar biasanya menyusun laporan keuangan dan melaporkan hasil laporan auditnya lebih lambat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki asset yang lebih kecil.

Ukuran pemerintah daerah erat kaitannya dengan teori signal dimana semakin besar pemerintah memberikan signal bawah maka pemerintah akan memiliki sumber daya yang besar untuk menyusun laporan yang baik sehingga durasi proses audit menjadi lebih singkat. Penelitian dengan variabel ukuran pemerintah daerah yang dijalankan (Syahyuni et al., 2018) membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap durasi proses audit. Berdasarkan uraian teoritis di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap durasi proses audit.

2. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Durasi Proses Audit

Temuan audit adalah permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh auditor di lapangan. Jumlah temuan audit berpengaruh pada lamanya penyelesaian laporan audit. Banyaknya temuan audit akan menambah waktu diskusi temuan baik di internal BPK antara tim audit lapangan dengan penanggungjawab audit maupun diskusi temuan dengan pemerintah daerah selaku auditan sebelum temuan tersebut layak untuk diangkat dalam laporan hasil audit. Selain itu, banyaknya temuan audit akan menambah waktu bagi auditan dalam memberikan tanggapan atas temuan tersebut.

Temuan audit memiliki kaitan dengan teori signal dimana semakin sedikit temuan audit maka mengindikasikan atau memberikan sinyal bahwa laporan telah disusun sesuai SAP sehingga auditor akan lebih cepat memeriksa laporan tersebut, karena sudah sesuai dengan standart dan tidak di temukan kesalahan yang bersifat material. Penelitian dengan variabel ukuran pemerintah daerah yang dijalankan oleh (Gamayuni, 2018) dan (Wafa & Nugraeni, 2018) membuktikan bahwa temuan

audit berpengaruh positif terhadap durasi proses audit. Berdasarkan uraian teoritis di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Temuan audit berpengaruh positif terhadap durasi proses audit.

3. Pengaruh Opini Audit Terhadap Durasi Proses Audit

Auditor dapat memilih jenis opini yang akan diberikan, jenis-jenis opini tersebut menurut Mulyadi (2002) dalam (Tullah et al., 2019) yaitu diantaranya WTP, WTPDPP, WDP, TW, dan TMP. Pemerintah daerah juga harus melakukan pelayanan dengan baik salah satunya yaitu dengan cara menyusun laporan keuangan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalkan salah saji yang dapat menyebabkan ketidakwajaran laporan keuangan sehingga opini yang didapatkan akan baik.

Opini Audit erat kaitannya dengan teori signal dimana semakin baik opini audit yang dilaporkan maka semakin cepat waktu yang di pakai untuk mengaudit, karena dapat memberikan sinyal bahwa pemerintah daerah yang diaudit telah baik dalam pembuatan LKPD nya. Penelitian dengan variabel opini audit yang dijalankan oleh (Bakar & Arza, 2019) membuktikan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap durasi proses audit. Berdasarkan uraian teoritis di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Opini audit berpengaruh negatif terhadap durasi proses audit.

4. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Durasi Proses Audit

Pemerintah pusat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah setiap tahun berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penggunaan DAU dan DAK oleh Pemerintah daerah telah diatur oleh pemerintah pusat. Adanya ketergantungan yang besar memungkinkan pemerintah pusat untuk melakukan pembatasan operasi pemerintah daerah dan meminta pengungkapan lebih baik untuk memantau kinerja pemerintah daerah dengan membatasi operasi tersebut.

Tingkat ketergantungan memiliki kaitannya dengan teori signal dimana penggunaan DAU dan DAK oleh pemerintah daerah diatur oleh pemerintah pusat sehingga pelaporan keuangan daerah kepada pemerintah pusat bertujuan untuk memberikan sinyal kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah pusat dapat menilai tingkat ketergantungan dana pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat melalui tingkat penyerapan dana yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian dengan variabel tingkat ketergantungan yang dijalankan oleh (Anggara & Cheisviyanny, 2020) membuktikan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap durasi proses audit. Berdasarkan uraian teoritis di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap durasi proses audit.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 34 Pemerintah Daerah Indonesia tahun 2015-2020 yang terdapat dalam Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang memenuhi kriteria *purposive sampling* untuk kebutuhan data penelitian.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data yang digunakan berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdaftar di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia tahun 2015-2020 yang diperoleh dari situs web <https://www.bpk.go.id>.

3.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah durasi proses audit. Variabel independen diantaranya ukuran pemerintah daerah, temuan audit, opini audit, dan tingkat ketergantungan.

3.3.1 Variabel Dependen

Durasi Proses Audit

Ettredge, Li, & Sun (2006) mendefinisikan durasi proses audit sebagai durasi dari akhir tahun fiskal perusahaan hingga tanggal ketika auditor menandatangani laporan mereka. Carslaw & Kaplan (1991) menyatakan juga bahwa durasi proses audit didefinisikan sebagai

jangka waktu antara akhir tahun buku perusahaan dan tanggal laporan audit diterbitkan. Sebagai contoh, laporan keuangan pemerintah daerah periode 2015 dengan tanggal tutup buku 31 Desember 2015 mempunyai laporan auditor dengan tanggal 26 Mei 2016, dengan demikian pelaporan audit atau durasi proses audit dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut sebesar 147 hari.

3.3.2 Variabel Independen

a) Ukuran Pemerintah Daerah

Tullah et al., (2019) mendefinisikan ukuran pemerintah daerah sebagai suatu gambaran besar kecilnya suatu perusahaan atau daerah. Ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini diproksikan dengan melihat total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dengan ukuran pemerintah daerah yang lebih besar cenderung memiliki pengendalian internal dan sumber daya manusia yang lebih banyak dan terampil dalam mengelola laporan keuangan pemerintah daerah. Secara sistematis Ukuran Pemerintah Daerah dirumuskan sebagai berikut :

| | | |
|--------------------------|-------------|---|
| Ukuran Pemerintah Daerah | SIZE | Logaritma natural dari total asset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. |
|--------------------------|-------------|---|

b) Temuan Audit

Temuan audit merupakan total kasus yang mengandung unsur pelanggaran terhadap pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan audit biasanya ditemukan oleh auditor karena adanya masalah di lapangan. Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada total temuan audit yang dianggap mempengaruhi durasi penyelesaian laporan audit (Gamayuni, 2018). Secara sistematis Temuan Audit dirumuskan sebagai berikut :

| | | |
|--------------|-------------|---|
| Temuan Audit | FIND | Total kasus yang mengandung unsur pelanggaran terhadap SPI dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. |
|--------------|-------------|---|

c) Opini Audit

Hasil dari pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah yang berupa opini audit merupakan sebuah cerminan kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan APBD. Ada empat jenis opini atas laporan keuangan pemerintah, antara lain : Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Opini Wajar Dengan Pengecualian, Opini Tidak Wajar, dan Tidak memberikan opini (Gamayuni, 2018). Opini yang baik diberikan pemerintah daerah berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian karena menunjukkan bahwa salah saji yang terdapat dalam laporan keuangan tidak banyak ditemukan auditor.

| | | |
|-------------|--------------|---|
| Opini Audit | OPINI | Menggunakan variabel dummy; kode 1 untuk opini WTP dan kode 0 untuk opini non-WTP |
|-------------|--------------|---|

d) Tingkat Ketergantungan

Dalam penelitian ini tingkat ketergantungan dilihat karena adanya ketergantungan daerah yang besar terhadap pemerintah pusat dengan keterbatasan dalam penggunaan dana. Pemerintah daerah dalam menggunakan dananya juga harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat (Priharjanto & Wardani, 2017). Dalam hal ini, tingkat ketergantungan diukur dengan melihat total transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang digunakan

untuk membiayai operasionalnya. Secara sistematis Tingkat Ketergantungan dirumuskan sebagai berikut :

| | | |
|------------------------|-----------|--|
| Tingkat Ketergantungan | TK | $\frac{\text{Pendapatan transfer}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100$ |
|------------------------|-----------|--|

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu durasi proses audit, ukuran pemerintah daerah, temuan audit, opini audit, dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah. Analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabel independen dan dependen yang dijabarkan dalam bentuk statistik.

3.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Nilai *R-Square* digunakan untuk melihat besarnya variasi dalam variabel dependen yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh variasi dalam variabel independen. Nilai *R-Square* adalah antara nol dan satu. Jika nilai koefisien determinasi mendekati nol berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti kemampuan variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

3.4.3 Uji Hipotesis (Uji T)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika probabilitas < taraf

signifikan 5% maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas secara individual terhadap variabel terikatnya. Namun, jika probabilitas > taraf signifikan 5% maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas secara individual terhadap variabel terikatnya.

3.4.4 Panel Data Model Testing

Fixed Effect Method

Fixed effect model merupakan model regresi data panel yang tidak memperhatikan dimensi individu dan waktu. Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep untuk setiap individu ini dikenal sebagai model regresi *fixed effect*. Istilah *fixed effect* berasal dari kenyataan bahwa meskipun intersep berbeda pada setiap individu, tetapi masing- masing intersep individu tidak bervariasi atau tetap sepanjang waktu (*time invariant*). Selain itu model juga mengasumsikan bahwa koefisien slope konstan sepanjang waktu dan individu. Estimasi yang dilakukan yaitu dengan teknik variabel *dummy* untuk individu. Selanjutnya, karena penggunaan *dummy* untuk estimasi *fixed effect* itu, maka literatur menyebutnya teknik *Least Square Dummy Variables (LSDV)*.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Dalam Bab ini akan membahas terkait hasil dan analisis penelitian berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran pemerintah daerah, temuan audit, opini audit, dan tingkat ketergantungan terhadap durasi proses audit pada pemerintah daerah Indonesia.

4.1 Deskripsi Hasil Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data diperoleh dari data yang sudah ada di website serta laporan keuangan pemerintah daerah Indonesia. Data yang diperoleh yaitu sejumlah 34 pemerintah daerah Indonesia tahun 2015-2020. Dari data yang diambil berikut tabel hasil statistik deskriptif.

Tabel 4.1 Deskriptif Data

| | <i>Mean</i> | <i>Median</i> | <i>Min</i> | <i>Max</i> | <i>Standard Deviation</i> |
|-------------------------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------------------|
| Ukuran Pemerintah Daerah (X1) | 0,936275 | 1 | 0 | 1 | 0,244864 |
| Temuan Audit (X2) | 13,04734 | 13,00546 | 12,19372 | 14,71630 | 0,441931 |
| Opini Audit (X3) | 16,84804 | 15 | 4 | 70 | 10,14678 |
| Tingkat Ketergantungan (X4) | 62,34836 | 63,61 | 17,58 | 107,0640 | 17,62599 |
| Durasi Proses Audit (Y) | 147,5980 | 146 | 99 | 209 | 15,90598 |

Sumber: Data Sekunder diambil 2022

Dari data pada tabel diatas dapat disimpulkan deskriptif dari setiap variabel sebagai berikut:

1. Variabel Ukuran Pemerintah daerah menunjukkan nilai median atau nilai tengah dari variabel ini sebesar 1. Selain itu nilai rata-rata yang didapat sebesar 0,936275. Pemerintah daerah memiliki ukuran yang berbeda-beda ditinjau dari segi aset, dari hasil pengujian aset terkecil yang dimiliki pemerintah daerah sebesar 0 dan aset terbesarnya yaitu 1. Dari hasil ini menandakan bahwa di Indonesia ukuran pemerintah daerah

berbeda-beda. Dari data variabel ukuran pemerintah daerah memiliki standar deviasi sebesar 0,244864.

2. Variabel Temuan Audit menunjukkan nilai median atau nilai tengah dari variabel ini sebesar 13,00546. Selain itu nilai rata-rata yang didapat sebesar 13,04734. Temuan audit dilihat dari total kasus yang mengandung unsur pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan memiliki nilai maksimum 14,71630 dan nilai minimum 12,19372. Dari data diatas temuan audit memiliki standar deviasi sebesar 0,441931.
3. Variabel Opini Audit menunjukkan nilai median atau nilai tengah dari variabel ini sebesar 15. Selain itu nilai rata-rata yang didapat sebesar 16,84804. Opini audit BPK setiap daerah memiliki hasil yang berbeda-beda, terlihat ada pemerintah daerah yang mendapat poin 1 yang artinya mendapat opini WTP dan poin 0 untuk opini selain WTP. Dari hasil ini menandakan bahwa opini atas laporan keuangan pemerintah daerah ada yang sudah baik dan ada yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Opini audit dalam data tersebut memiliki nilai maksimum 70 dan nilai minimum 4. Dari data diatas opini audit memiliki standar deviasi sebesar 10,14678.
4. Variabel Tingkat Ketergantungan menunjukkan nilai median atau nilai tengah dari variabel ini sebesar 63,61. Selain itu nilai rata-rata yang didapat sebesar 62,34836. Tingkat ketergantungan dilihat karena adanya ketergantungan daerah yang besar terhadap pemerintah pusat dengan keterbatasan dalam penggunaan dana. Dari data diatas variabel ini memiliki nilai maksimum 107,0640 dan nilai minimum 17,58. Sedangkan standar deviasi dari variabel tingkat ketergantungan sebesar 17,62599.
5. Variabel Durasi Proses Audit menunjukkan nilai median atau nilai tengah dari variabel ini sebesar 146. Selain itu nilai rata-rata yang didapat sebesar 147,5980. Durasi proses audit sebagai durasi dari akhir tahun fiskal hingga tanggal ketika auditor menandatangani laporan mereka. Durasi proses audit memiliki nilai maksimum 209

dan nilai minimum 99. Dari data diatas durasi proses audit memiliki standar deviasi sebesar 15,90598.

4.2 Analisis Model Struktural

Sebelum uji Hipotesis dilakukan, peneliti melakukan evaluasi terhadap model structural menggunakan pengujian *R-Square*. Pada Tabel 4.2 menggambarkan hasil Uji *R-Square*.

Tabel 4.2 Analisis *R-Square*

| | <i>R-Square</i> |
|---------------------|-----------------|
| Durasi Proses Audit | 0,557 |

Sumber: Hasil Olah Data 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui hasil nilai R-Square dari Durasi Proses Audit sebesar 0,557 (55,7%). Hal ini menandakan bahwa variabilitas Durasi Proses Audit dapat dijelaskan atau diprediksi oleh perubahan atau variabilitas dalam variabel independen yaitu ukuran pemerintah daerah, temuan audit, opini audit, dan tingkat ketergantungan. Sedangkan sisanya 44,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

4.3 Uji Hipotesis (Uji T)

Sebuah hipotesis dapat disimpulkan diterima atau ditolak dengan melihat nilai signifikansi antar hubungan. Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui secara masing-masing pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai sig lebih kecil < daripada 0,05 atau nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka dapat dikatakan terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya apabila nilai sig lebih besar > daripada 0,05 atau nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y.

Tabel 4.3 Hasil Uji Hipotesis

| Variabel | Coefficient | Prob. | Keterangan |
|-------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| Ukuran Pemerintah Daerah (X1) | -8,962211 | 0,6342 | Ditolak |
| Temuan Audit (X2) | -0,180504 | 0,2833 | Ditolak |
| Opini Audit (X3) | -8,724952 | 0,0343 | Didukung |
| Tingkat Ketergantungan (X4) | -0,183999 | 0,2524 | Ditolak |

Sumber: Hasil Olah Data 2022

Berdasarkan tabel di atas didapat hasil bahwa Ukuran Pemerintah Daerah menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap durasi proses audit dengan koefisien -8,962211 dan nilai probabilitas 0,6342 dengan nilai $P Value > 0,05$ maka tidak memiliki pengaruh terhadap durasi proses audit. Oleh sebab itu Hipotesis Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap durasi proses audit ditolak.

Temuan Audit menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap durasi proses audit dengan koefisien -0,180504 dan nilai probabilitas 0,2833 dengan $P Value > 0,05$ maka tidak memiliki pengaruh terhadap durasi proses audit. Oleh sebab itu Hipotesis Temuan Audit berpengaruh positif terhadap durasi proses audit ditolak

Opini Audit menunjukkan hasil berpengaruh negatif terhadap durasi proses audit dengan koefisien -8,724952 dan nilai probabilitas 0,0343 dengan $P Value < 0,05$ maka memiliki pengaruh terhadap durasi proses audit. Oleh sebab itu Hipotesis Opini Audit berpengaruh negatif terhadap durasi proses audit didukung.

Tingkat ketergantungan menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap durasi proses audit dengan koefisien -0,183999 dan nilai probabilitas 0,2524 dengan $P Value > 0,05$ maka tidak memiliki pengaruh terhadap durasi proses audit. Oleh sebab itu Hipotesis Tingkat Ketergantungan berpengaruh positif terhadap durasi proses audit ditolak.

4.4 Fixed Effect Method

Tabel 4.4 Hasil Uji Fixed Effect Method

| Variabel | Coefficient | t-Statistic | Prob. |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Ukuran Pemerintah Daerah (X1) | -8,962211 | -0,476668 | 0,6342 |
| Temuan Audit (X2) | -0,180504 | -1,076576 | 0,2833 |
| Opini Audit (X3) | -8,724952 | -2,135247 | 0,0343 |
| Tingkat Ketergantungan (X4) | -0,183999 | -1,148718 | 0,2524 |

Sumber: Hasil Olah Data 2022

4.5 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setelah dilakukan pengujian maka didapatkan beberapa hasil yang menunjukkan pengaruh antar variabel sehingga dapat menentukan apakah hipotesis tersebut didukung atau tidak didukung. Pada bagian ini akan membahas hasil pengujian yang telah dilakukan.

Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap durasi proses audit

Hipotesis Pertama (H1) menguji Ukuran Pemerintah Daerah terhadap durasi proses audit. Hasil yang didapatkan tingkat signifikansi yaitu 0,6342, hasil ini didapat nilai yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap durasi proses audit sehingga hipotesis pertama (H1) **ditolak**.

Alasan berkaitan dengan ditolakannya hipotesis pertama karena besar maupun kecil ukuran pemerintah daerah bukan menjadi sebuah alasan untuk pemerintah daerah dalam penyampaian laporan keuangan tidak tepat waktu dan berakibat pada bertambahnya tenggang waktu durasi proses audit. Pemerintah daerah yang berskala besar belum tentu akan tepat waktu dalam penyajian laporan keuangan, sedangkan pemerintah daerah yang berskala kecil belum tentu akan terlambat dalam menyajikan laporan keuangan. Dilihat dari unsur kepatuhan pada peraturan yang berlaku dan pengawasan DPRD serta masyarakat yang mewajibkan pemerintah daerah untuk tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya. Aset tetap selalu menjadi temuan BPK yang menyebabkan kerugian negara

paling besar karena dengan penjelasan temuan atas sistem pengendalian internal (SPI) dan kepatuhan perundang-undangan pada IHPS II BPK Tahun 2013 dengan permasalahan yang dihadapi aset tetap sangat beragam dari segi pengadaan, pencatatan, status kepemilikan tidak didukung bukti, penguasaan oleh pihak lain dan keberadaan yang tidak jelas, maka dari itu aset yang seharusnya bisa digunakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan menjadi sumber permasalahan. Pemerintah daerah dengan ukuran yang besar akan memiliki birokrasi yang lebih kompleks sehingga pengawasan terhadap pengelolaan aset pemerintah daerah akan lebih sulit jika dibanding dengan pemerintah daerah yang kecil. Hal ini menimbulkan potensi ketidakakuratan dalam pencatatan aset. Dengan demikian, besarnya ukuran suatu pemerintah daerah tidak menjamin bahwa pemerintah daerah dapat membuat laporan keuangan yang berkualitas. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ali et al., 2019) ; (Gamayuni, 2018) ; (Bakar & Arza, 2019) ; (Priharjanto & Wardani, 2017) ; dan (Tullah et al., 2019) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap durasi proses audit.

Temuan Audit berpengaruh terhadap durasi proses audit

Hipotesis Kedua (H2) menguji Temuan Audit terhadap durasi proses audit. Hasil yang didapatkan tingkat signifikansi yaitu 0,2833, hasil ini didapat nilai yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Temuan Audit tidak memiliki pengaruh terhadap durasi proses audit sehingga hipotesis kedua (H2) **ditolak**.

Temuan audit BPK dilihat dari aspek sistem pengendalian internal bukan merupakan faktor penentu tinggi rendahnya kinerja keuangan daerah. Hal ini dikarenakan Lembaga SPI pemerintah daerah yang masih merupakan bagian dari pemerintah daerah itu sendiri, sehingga terindikasi lemah dalam aspek independensinya. Oleh sebab itu, perbaikan sistem pengendalian internal pemerintah daerah merupakan hal yang hendaknya perlu dilakukan.

Sedangkan, temuan audit BPK dilihat dari aspek ketidakpatuhan ketentuan perundangan merupakan faktor penentu tinggi rendahnya kinerja keuangan daerah tersebut. Hal ini dikarenakan ketaatan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundangan berkaitan langsung dengan kinerja keuangan daerah. Setiap pemerintah daerah harus taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku karena merupakan prosedur dasar dalam menjalankan pemerintahan.

Latar belakang ditolaknya Temuan Audit terhadap durasi proses audit bisa jadi dikarenakan persentase perbedaan yang tinggi tidak serta merta mendorong pemerintah kota untuk meningkatkan pengungkapan informasi keuangan. Rekomendasi dan koreksi BPK terkait publikasi laporan keuangan dan perubahan hasil pemeriksaan tidak sepenuhnya diikuti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel temuan audit baik kasus maupun nilai memiliki hasil yang sama yaitu tidak signifikan. Hal ini menunjukkan ada kurangnya perhatian pemerintah daerah saat melaksanakan rekomendasi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Priharjanto & Wardani, 2017) menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap durasi proses audit.

Opini Audit berpengaruh terhadap durasi proses audit

Hipotesis Ketiga (H3) menguji Opini Audit terhadap durasi proses audit. Hasil yang didapatkan tingkat signifikansi yaitu 0,0343, hasil ini didapat nilai yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Opini Audit tidak memiliki pengaruh terhadap durasi proses audit sehingga hipotesis ketiga (H3) **diterima**.

Alasan berkaitan dengan diterimanya hipotesis ketiga karena banyak pemerintah daerah yang mendapatkan laporan hasil pemeriksaan atau opini audit wajar tanpa pengecualian. Pernyataan opini WTP dari BPK dapat menunjukkan adanya kesalahan material dalam laporan keuangan daerah yang cenderung kecil dalam laporan keuangan daerah dan dapat

menjadi contoh tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Selain itu, pemberian opini wajar tanpa pengecualian juga menunjukkan bahwa pemda yang bersangkutan telah melaporkan laporan keuangannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan telah melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan baik. Maka dari itu dengan tata kelola pemerintah daerah yang baik dapat mempersiapkan dan menyerahkan laporan keuangannya ke BPK lebih cepat dan durasi proses audit diperkirakan akan berkurang. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ali et al., 2019) ; (Priharjanto & Wardani, 2017) ; (Tullah et al., 2019) ; (Wafa & Nugraeni, 2018) ; dan (Bakar & Arza, 2019) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap durasi proses audit.

Tingkat ketergantungan berpengaruh terhadap durasi proses audit

Hipotesis Keempat (H4) menguji Tingkat Ketergantungan terhadap durasi proses audit. Hasil yang didapatkan tingkat signifikansi yaitu 0,2524, hasil ini didapat nilai yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat Ketergantungan tidak memiliki pengaruh terhadap durasi proses audit sehingga hipotesis keempat (H4) **ditolak**.

Hal ini dikarenakan seberapa pun jumlah dana yang diberikan oleh pusat tidak akan mempengaruhi durasi proses audit. Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana transfer dari pusat untuk membantu daerah dalam menjalankan operasionalnya terlihat belum digunakan secara optimal oleh pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat merupakan hal yang wajar bagi pemerintah daerah yang sedang berkembang. Dukungan APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur dan kelancaran penyelenggaraan pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan upaya daerah untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dengan lebih mengutamakan

menggunakan hasil pendapatan daerah itu sendiri. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Badruddin, Agustina, & Chyntia, 2019) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap durasi proses audit.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi durasi proses audit pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang terdaftar di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia tahun 2015-2020 yang diperoleh dari situs web <https://www.bpk.go.id>. Penelitian ini meneliti 34 pemerintah daerah. Berdasarkan dari hasil analisis dan pengukuran ditemukan hasil sebagai berikut :

1. Ukuran pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap durasi proses audit pada pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan karena besar maupun kecil ukuran pemerintah daerah bukan menjadi sebuah alasan untuk pemerintah daerah dalam penyampaian laporan keuangan tidak tepat waktu.
2. Temuan audit tidak memiliki pengaruh terhadap durasi proses audit pada pemerintah daerah. Hal ini bisa jadi dikarenakan persentase perbedaan yang tinggi tidak serta merta mendorong pemerintah kota untuk meningkatkan pengungkapan informasi keuangan.
3. Opini audit memiliki pengaruh terhadap durasi proses audit pada pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan karena banyak pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian. Pernyataan opini WTP dari BPK dapat menunjukkan adanya kesalahan material dalam laporan keuangan daerah yang biasanya minor dan dapat menjadi contoh tata kelola pemerintahan daerah yang baik
4. Tingkat ketergantungan tidak memiliki pengaruh terhadap durasi proses audit pada pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan tingkat ketergantungan pemerintah daerah

terhadap pemerintah pusat merupakan hal yang wajar bagi pemerintah daerah yang sedang berkembang. Dukungan APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur dan kelancaran penyelenggaraan pemerintah pusat.

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dialami oleh penulis yang bisa jadi memberikan pengaruh terhadap hasil penelitian. Berikut keterbatasan pada penelitian ini :

1. Keterbatasan pada penelitian ini adalah kesulitan dalam mendapatkan data keuangan maupun non keuangan karena data yang terdapat dalam website tidak semua tahun tersedia.
2. Penelitian ini hanya dilakukan selama 6 tahun anggaran yaitu tahun 2015 sampai dengan 2020.
3. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang ada pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

5.2.2 Saran

Dalam penelitian ini didapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi durasi proses audit.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya pada pemerintah daerah saja, akan tetapi dapat mengambil sampel penelitian sektor lain atau sektor tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S., Yeni, N. S., & Si, M. (2019). The Influence of Government Size , Audit Opinion and Incumbent on Audit Delay in the Provincial Government in Indonesia. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 12, 118–126.
- Anggara, E., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2162–2184. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.205>
- Badruddin, Agustina, N., & Chyntia, E. (2019). Pengaruh Kemandirian Daerah, Tingkat Ketergantungan, Ukuran Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 5, 29–40.
- Bakar, M. P., & Arza, F. I. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit, Dan Leverage Terhadap Audit Delay. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1168–1183. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.134>
- Carlsaw, C. A. P. N., & Kaplan, S. E. (1991). An Examination of Audit Delay: Further Evidence from New Zealand. *Accounting and Business Research*, 22(85), 21–32.
- Endiana, I. D. M., & Apriada, I. K. (2020). Analisis Dampak Internal yang Mempengaruhi Audit Delay. *Accounting Profession Journal (ApaJi)*, 2(2), 82–93.
- Ettredge, M. L., Li, C., & Sun, L. (2006). The Impact of SOX Section 404 Internal Control Quality Assessment on Audit Delay in The SOX Era. *Auditing*, 25(2), 1–23. <https://doi.org/10.2308/aud.2006.25.2.1>
- Gamayuni, R. R. (2018). Determinant Analysis Of Audit Report Lag In Regional Governments In Indonesia. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH*, 7(4).
- Priharjanto, A., & Wardani, Y. Y. (2017). Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Info Artha*, 1, 97–110. <https://doi.org/10.31092/jia.v1i1.72>

- Purnama, M., Gamayuni, R. R., & Amelia, Y. (2018). *Pengaruh Opini Audit, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Audit Delay*. 1(1), 78–88. Retrieved from <http://repository.lppm.unila.ac.id/17587/>
- Siregar, B. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Audit Delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 89. <https://doi.org/10.21460/jrak.2015.112.10>
- Syahyuni, I. E., Arza, F. I., & Afriyenti, M. (2018). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Ketergantungan Pemerintah Daerah dan Opini Audit Terhadap Audit Delay*. 66. Retrieved from https://www.fairportlibrary.org/images/files/RenovationProject/Concept_cost_estimate_accepted_031914.pdf
- Tullah, D. S., Apriyanti, E., & Rianti, F. (2019). *Pengaruh Ukuran Daerah, Opini Audit dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2015-2016*. 12(2), 171–185. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.02.001>
- Wafa, Z., & Nugraeni, N. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuru Buana*, 4(1), 51. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i1.497>

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Hasil Olah Data

Statistik Deskriptif

Date: 08/12/22 Time: 20:51
Sample: 2015 2020

| | Y | X1 | X2 | X3 | X4 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Mean | 147.5980 | 13.04734 | 16.84804 | 0.936275 | 62.34836 |
| Median | 146.0000 | 13.00546 | 15.00000 | 1.000000 | 63.61000 |
| Maximum | 209.0000 | 14.71630 | 70.00000 | 1.000000 | 107.0640 |
| Minimum | 99.00000 | 12.19372 | 4.000000 | 0.000000 | 17.58000 |
| Std. Dev. | 15.90598 | 0.441931 | 10.14678 | 0.244864 | 17.62599 |
| Skewness | 0.603310 | 1.248861 | 3.087891 | -3.572166 | -0.134717 |
| Kurtosis | 5.115470 | 6.408922 | 15.28893 | 13.76037 | 2.450255 |
| Jarque-Bera Probability | 50.41473 0.000000 | 151.8045 0.000000 | 1607.844 0.000000 | 1418.030 0.000000 | 3.185921 0.203323 |
| Sum | 30110.00 | 2661.657 | 3437.000 | 191.0000 | 12719.07 |
| Sum Sq. Dev. | 51359.04 | 39.64651 | 20900.29 | 12.17157 | 63067.12 |
| Observations | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |

Fixed Effect Method

Dependent Variable: ARL
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/15/22 Time: 21:15
 Sample: 2015 2020
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 204

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| SIZE | -8.962211 | 18.80177 | -0.476668 | 0.6342 |
| FIND | -0.180504 | 0.167665 | -1.076575 | 0.2833 |
| OPINI | -8.724952 | 4.086156 | -2.135247 | 0.0343 |
| TK | -0.183999 | 0.160178 | -1.148718 | 0.2524 |
| C | 287.2132 | 246.9162 | 1.163201 | 0.2465 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
 Period fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.557129 | Mean dependent var | 147.5980 |
| Adjusted R-squared | 0.441597 | S.D. dependent var | 15.90598 |
| S.E. of regression | 11.88596 | Akaike info criterion | 7.973446 |
| Sum squared resid | 22745.44 | Schwarz criterion | 8.672853 |
| Log likelihood | -770.2915 | Hannan-Quinn criter. | 8.256369 |
| F-statistic | 4.822306 | Durbin-Watson stat | 1.995351 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

Lampiran 1.2 Daftar Pengumpulan Data

| PROVINSI | PERIODE | AUDIT REPORT LAG | SIZE | FINDING | OPINI | TINGKAT KETERGANTUNGAN |
|-----------------|---------|---------------------|-------------|---------|-------|---------------------------|
| Pemerintah Aceh | 2015 | 157 | 13,20759175 | 7 | 0 | 82,550 |
| | 2016 | 160 | 13,27673024 | 29 | 1 | 83,300 |
| | 2017 | 141 | 13,31065358 | 26 | 1 | 83,681 |
| | 2018 | 140 | 13,38152297 | 24 | 1 | 83,630 |
| | 2019 | 176 | 13,45415098 | 20 | 1 | 82,840 |
| | 2020 | 123 | 13,48135428 | 32 | 1 | 84,439 |
| Sumatera Utara | 2015 | 144 | 13,09017507 | 15 | 1 | 42,246 |
| | 2016 | 139 | 13,15082241 | 31 | 1 | 50,370 |
| | 2017 | 141 | 13,29265681 | 22 | 1 | 56,626 |
| | 2018 | 123 | 13,30073019 | 17 | 1 | 55,539 |
| | 2019 | 163 | 13,2699004 | 15 | 1 | 55,817 |
| | 2020 | 141 | 13,24783807 | 11 | 1 | 56,887 |
| Sumatera Barat | 2015 | 144 | 12,85539958 | 5 | 1 | 52,907 |
| | 2016 | 139 | 12,91130719 | 17 | 1 | 56,623 |
| | 2017 | 108 | 13,03128238 | 17 | 1 | 64,564 |
| | 2018 | 114 | 13,02605137 | 14 | 1 | 63,603 |
| | 2019 | 140 | 13,03727083 | 19 | 1 | 63,328 |
| | 2020 | 126 | 13,02780374 | 17 | 1 | 65,092 |
| Riau | 2015 | 151 | 13,4157565 | 12 | 1 | 36,878 |
| | 2016 | 149 | 13,50028463 | 30 | 1 | 55,157 |
| | 2017 | 136 | 13,49894714 | 30 | 1 | 57,443 |
| | 2018 | 137 | 13,50793418 | 30 | 1 | 55,285 |
| | 2019 | 178 | 13,51932949 | 13 | 1 | 59,077 |
| | 2020 | 117 | 13,51911969 | 28 | 1 | 61,307 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|------|-----|-------------|----|---|--------|
| Jambi | 2015 | 151 | 12,73160297 | 10 | 1 | 60,295 |
| | 2016 | 151 | 12,79453705 | 18 | 1 | 63,617 |
| | 2017 | 159 | 12,89888738 | 14 | 1 | 63,158 |
| | 2018 | 179 | 12,92920595 | 26 | 1 | 62,422 |
| | 2019 | 182 | 12,95142102 | 11 | 1 | 63,877 |
| | 2020 | 148 | 12,95707059 | 41 | 1 | 17,580 |
| Sumatera Selatan | 2015 | 147 | 13,1386299 | 11 | 1 | 57,180 |
| | 2016 | 149 | 13,18407529 | 22 | 1 | 61,101 |
| | 2017 | 145 | 13,34564789 | 28 | 1 | 49,550 |
| | 2018 | 143 | 13,3601375 | 24 | 1 | 61,017 |
| | 2019 | 181 | 13,41283055 | 11 | 1 | 62,120 |
| | 2020 | 126 | 13,50508472 | 12 | 1 | 63,328 |
| Bengkulu | 2015 | 148 | 12,50399568 | 11 | 0 | 67,749 |
| | 2016 | 150 | 12,59136531 | 22 | 0 | 68,729 |
| | 2017 | 148 | 12,70311152 | 17 | 1 | 71,237 |
| | 2018 | 142 | 12,75851505 | 13 | 1 | 69,376 |
| | 2019 | 174 | 12,78251214 | 12 | 1 | 71,787 |
| | 2020 | 141 | 12,79555862 | 23 | 1 | 72,970 |
| Lampung | 2015 | 152 | 12,63630262 | 11 | 1 | 52,650 |
| | 2016 | 143 | 12,68870744 | 18 | 1 | 57,428 |
| | 2017 | 151 | 12,85915707 | 14 | 1 | 39,156 |
| | 2018 | 144 | 12,94869069 | 23 | 1 | 39,672 |
| | 2019 | 156 | 12,98753453 | 12 | 1 | 36,765 |
| | 2020 | 113 | 13,05045701 | 22 | 1 | 35,735 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 2015 | 196 | 12,53038543 | 7 | 0 | 69,698 |
| | 2016 | 200 | 12,57708287 | 21 | 0 | 70,518 |
| | 2017 | 144 | 12,60137759 | 45 | 1 | 68,412 |
| | 2018 | 171 | 12,62885391 | 14 | 1 | 66,259 |
| | 2019 | 139 | 12,64901114 | 10 | 1 | 65,619 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|-----|-------------|----|---|---------|
| | 2020 | 144 | 12,64986853 | 8 | 1 | 107,064 |
| Kepulauan Riau | 2015 | 147 | 12,58719018 | 6 | 1 | 59,666 |
| | 2016 | 146 | 12,5880408 | 24 | 1 | 62,167 |
| | 2017 | 138 | 12,67356028 | 15 | 1 | 66,301 |
| | 2018 | 140 | 12,77209983 | 13 | 1 | 65,086 |
| | 2019 | 149 | 12,80992486 | 15 | 1 | 66,671 |
| | 2020 | 130 | 12,81240203 | 11 | 1 | 65,936 |
| DKI Jakarta | 2015 | 152 | 14,62434542 | 35 | 0 | 19,549 |
| | 2016 | 149 | 14,6463814 | 69 | 0 | 28,394 |
| | 2017 | 145 | 14,66708084 | 67 | 1 | 29,263 |
| | 2018 | 134 | 14,69276097 | 70 | 1 | 29,158 |
| | 2019 | 171 | 14,7136208 | 60 | 1 | 23,265 |
| | 2020 | 148 | 14,71630466 | 66 | 1 | 30,352 |
| Jawa Barat | 2015 | 152 | 13,40780705 | 7 | 1 | 33,129 |
| | 2016 | 163 | 13,45157985 | 19 | 1 | 38,375 |
| | 2017 | 144 | 13,57257482 | 9 | 1 | 43,493 |
| | 2018 | 144 | 13,59477367 | 14 | 1 | 41,988 |
| | 2019 | 178 | 13,60985513 | 17 | 1 | 40,951 |
| | 2020 | 147 | 13,58669619 | 16 | 1 | 46,113 |
| Jawa Tengah | 2015 | 147 | 13,37423189 | 11 | 1 | 34,987 |
| | 2016 | 150 | 13,48783442 | 18 | 1 | 41,035 |
| | 2017 | 143 | 13,53394467 | 26 | 1 | 46,905 |
| | 2018 | 143 | 13,56089621 | 23 | 1 | 44,403 |
| | 2019 | 178 | 13,57403355 | 14 | 1 | 44,079 |
| | 2020 | 141 | 13,57080326 | 10 | 1 | 46,083 |
| DI Yogyakarta | 2015 | 151 | 12,72534141 | 5 | 1 | 30,055 |
| | 2016 | 151 | 12,78181423 | 9 | 1 | 56,830 |
| | 2017 | 145 | 12,88969566 | 18 | 1 | 63,297 |
| | 2018 | 144 | 12,96072092 | 9 | 1 | 61,155 |

| | | | | | | |
|---------------------------|------|-----|-------------|----|---|--------|
| | 2019 | 109 | 13,016389 | 11 | 1 | 61,170 |
| | 2020 | 110 | 13,05444206 | 8 | 1 | 66,407 |
| Jawa Timur | 2015 | 151 | 13,43068877 | 8 | 1 | 30,525 |
| | 2016 | 149 | 13,47895829 | 20 | 1 | 36,461 |
| | 2017 | 144 | 13,57753762 | 16 | 1 | 41,862 |
| | 2018 | 137 | 13,60371105 | 20 | 1 | 41,890 |
| | 2019 | 167 | 13,61929603 | 15 | 1 | 41,895 |
| | 2020 | 145 | 13,62253391 | 17 | 1 | 42,919 |
| Banten | 2015 | 148 | 13,00588146 | 14 | 0 | 32,055 |
| | 2016 | 149 | 13,00151651 | 15 | 1 | 36,800 |
| | 2017 | 143 | 13,14450706 | 8 | 1 | 40,490 |
| | 2018 | 137 | 13,23290811 | 10 | 1 | 38,548 |
| | 2019 | 119 | 13,22677283 | 14 | 1 | 37,195 |
| | 2020 | 99 | 13,26432797 | 11 | 1 | 42,723 |
| Kalimantan Barat | 2015 | 151 | 12,83970328 | 9 | 1 | 58,067 |
| | 2016 | 146 | 12,88044625 | 4 | 1 | 62,863 |
| | 2017 | 148 | 12,94922541 | 10 | 1 | 63,873 |
| | 2018 | 144 | 13,05669629 | 14 | 0 | 61,180 |
| | 2019 | 181 | 13,08404472 | 9 | 1 | 61,204 |
| | 2020 | 127 | 13,09785034 | 17 | 1 | 61,902 |
| Kalimantan Tengah | 2015 | 165 | 12,94863821 | 16 | 1 | 63,344 |
| | 2016 | 143 | 12,98177222 | 12 | 1 | 66,441 |
| | 2017 | 134 | 12,99980245 | 12 | 1 | 66,567 |
| | 2018 | 137 | 13,04728229 | 17 | 1 | 64,939 |
| | 2019 | 167 | 13,0681096 | 17 | 1 | 63,950 |
| | 2020 | 180 | 13,04272575 | 15 | 1 | 68,981 |
| Kalimantan Selatan | 2015 | 148 | 13,00504517 | 13 | 1 | 51,131 |
| | 2016 | 146 | 13,04054581 | 14 | 1 | 51,399 |
| | 2017 | 145 | 13,07891773 | 17 | 1 | 48,483 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|------|-------------|-------------|---|--------|
| | 2018 | 140 | 13,23537181 | 22 | 1 | 45,497 |
| | 2019 | 167 | 13,26810785 | 16 | 1 | 47,369 |
| | 2020 | 145 | 13,26683082 | 22 | 1 | 53,372 |
| Kalimantan Timur | 2015 | 148 | 13,36974588 | 11 | 1 | 47,579 |
| | 2016 | 151 | 13,36385978 | 14 | 1 | 49,421 |
| | 2017 | 148 | 13,46066475 | 11 | 1 | 43,583 |
| | 2018 | 140 | 13,53060261 | 16 | 1 | 45,492 |
| | 2019 | 181 | 13,52985443 | 16 | 1 | 44,198 |
| | 2020 | 147 | 13,53926673 | 14 | 1 | 47,684 |
| | Kalimantan Utara | 2015 | 126 | 12,25705621 | 6 | 1 |
| 2016 | | 158 | 12,4893494 | 12 | 1 | 67,919 |
| 2017 | | 123 | 12,7724515 | 11 | 1 | 75,478 |
| 2018 | | 137 | 12,83246251 | 11 | 1 | 75,405 |
| 2019 | | 160 | 12,85604064 | 14 | 1 | 74,837 |
| 2020 | | 125 | 12,86384092 | 11 | 1 | 75,822 |
| Sulawesi Tengah | 2015 | 147 | 12,5740564 | 13 | 1 | 53,686 |
| | 2016 | 149 | 12,62446095 | 17 | 1 | 69,610 |
| | 2017 | 147 | 12,7377944 | 17 | 1 | 72,966 |
| | 2018 | 144 | 12,72452144 | 11 | 1 | 70,377 |
| | 2019 | 157 | 12,78640046 | 6 | 1 | 73,035 |
| | 2020 | 139 | 12,81348682 | 12 | 1 | 72,867 |
| Sulawesi Selatan | 2015 | 147 | 12,91095336 | 18 | 1 | 46,016 |
| | 2016 | 146 | 12,96080915 | 16 | 1 | 51,725 |
| | 2017 | 135 | 13,0500426 | 13 | 1 | 59,214 |
| | 2018 | 144 | 13,17890723 | 18 | 1 | 57,235 |
| | 2019 | 189 | 13,25213802 | 18 | 1 | 56,584 |
| | 2020 | 147 | 13,29306945 | 23 | 0 | 57,656 |
| Sulawesi Barat | 2015 | 150 | 12,19459274 | 11 | 1 | 81,298 |
| | 2016 | 146 | 12,27859607 | 13 | 1 | 83,653 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------|-----|-------------|----|---|--------|
| | 2017 | 151 | 12,39750998 | 20 | 1 | 83,645 |
| | 2018 | 144 | 12,44059875 | 16 | 1 | 83,325 |
| | 2019 | 174 | 12,46432886 | 16 | 1 | 82,962 |
| | 2020 | 147 | 12,47358454 | 18 | 1 | 82,534 |
| Sulawesi Utara | 2015 | 159 | 12,68390449 | 19 | 1 | 59,872 |
| | 2016 | 138 | 12,78894278 | 32 | 1 | 65,469 |
| | 2017 | 145 | 12,84799662 | 21 | 1 | 68,970 |
| | 2018 | 141 | 12,89065158 | 27 | 1 | 66,829 |
| | 2019 | 152 | 12,9650071 | 16 | 1 | 67,342 |
| | 2020 | 120 | 12,99717714 | 16 | 1 | 68,962 |
| Gorontalo | 2015 | 146 | 12,19371625 | 22 | 1 | 92,415 |
| | 2016 | 146 | 12,23685969 | 13 | 1 | 80,306 |
| | 2017 | 145 | 12,34060292 | 19 | 1 | 80,329 |
| | 2018 | 142 | 12,3583881 | 20 | 1 | 78,612 |
| | 2019 | 167 | 12,36672165 | 11 | 1 | 77,557 |
| | 2020 | 147 | 12,38838403 | 15 | 1 | 77,396 |
| Sulawesi Tenggara | 2015 | 130 | 12,87770992 | 16 | 1 | 72,276 |
| | 2016 | 150 | 12,9132332 | 17 | 1 | 72,748 |
| | 2017 | 145 | 12,97517487 | 11 | 1 | 77,185 |
| | 2018 | 144 | 12,99868868 | 19 | 1 | 76,121 |
| | 2019 | 149 | 13,03377083 | 19 | 1 | 71,047 |
| | 2020 | 149 | 13,06142007 | 17 | 1 | 72,792 |
| Bali | 2015 | 151 | 12,74943085 | 9 | 1 | 38,686 |
| | 2016 | 150 | 12,93221236 | 10 | 1 | 41,968 |
| | 2017 | 148 | 12,94053043 | 9 | 1 | 43,023 |
| | 2018 | 142 | 13,01814057 | 6 | 1 | 40,507 |
| | 2019 | 139 | 13,03665833 | 9 | 1 | 39,372 |
| | 2020 | 137 | 13,02183249 | 5 | 1 | 46,222 |
| Nusa Tenggara Barat | 2015 | 148 | 13,03815576 | 14 | 1 | 60,146 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------|-----|-------------|----|---|--------|
| | 2016 | 150 | 13,07521263 | 13 | 1 | 65,520 |
| | 2017 | 144 | 13,12033417 | 9 | 1 | 65,359 |
| | 2018 | 144 | 13,0975059 | 16 | 1 | 66,196 |
| | 2019 | 169 | 13,10266824 | 11 | 1 | 65,102 |
| | 2020 | 127 | 13,10892844 | 15 | 1 | 64,770 |
| Nusa Tenggara Timur | 2015 | 152 | 12,65181211 | 18 | 1 | 73,159 |
| | 2016 | 142 | 12,72870569 | 18 | 1 | 74,144 |
| | 2017 | 138 | 12,79386737 | 18 | 1 | 77,522 |
| | 2018 | 147 | 12,8761562 | 11 | 1 | 76,977 |
| | 2019 | 209 | 12,96134262 | 11 | 1 | 75,978 |
| | 2020 | 137 | 12,99037128 | 18 | 1 | 76,963 |
| Maluku | 2015 | 144 | 12,61792373 | 17 | 1 | 81,655 |
| | 2016 | 149 | 12,66955336 | 10 | 0 | 81,690 |
| | 2017 | 145 | 12,65787205 | 18 | 1 | 84,402 |
| | 2018 | 147 | 12,70191511 | 12 | 1 | 84,842 |
| | 2019 | 167 | 12,71506554 | 10 | 1 | 84,356 |
| | 2020 | 151 | 12,76340842 | 16 | 1 | 82,042 |
| Maluku Utara | 2015 | 147 | 12,353865 | 15 | 1 | 83,252 |
| | 2016 | 144 | 12,45846912 | 11 | 1 | 85,193 |
| | 2017 | 142 | 12,60446902 | 15 | 1 | 82,634 |
| | 2018 | 147 | 12,60466706 | 8 | 0 | 84,400 |
| | 2019 | 178 | 12,68524918 | 17 | 1 | 82,369 |
| | 2020 | 139 | 12,72186408 | 22 | 1 | 81,925 |
| Papua | 2015 | 151 | 13,20657674 | 18 | 0 | 92,263 |
| | 2016 | 144 | 13,281692 | 11 | 1 | 91,845 |
| | 2017 | 124 | 13,32599658 | 15 | 1 | 92,149 |
| | 2018 | 129 | 13,33510719 | 21 | 1 | 92,180 |
| | 2019 | 177 | 13,39051476 | 14 | 1 | 86,595 |
| | 2020 | 144 | 13,39128976 | 5 | 1 | 89,308 |

| | | | | | | |
|--------------------|------|-----|-------------|----|---|--------|
| Papua Barat | 2015 | 148 | 12,89734693 | 12 | 1 | 94,473 |
| | 2016 | 149 | 12,95571519 | 11 | 1 | 94,973 |
| | 2017 | 145 | 13,02491372 | 13 | 1 | 93,335 |
| | 2018 | 143 | 13,08038088 | 11 | 1 | 93,717 |
| | 2019 | 177 | 13,19543569 | 17 | 1 | 95,728 |
| | 2020 | 148 | 13,21177025 | 14 | 1 | 95,220 |

